Merlince Jola Marawali_2022210075

by UNITRI Press

Submission date: 28-Apr-2026 10:38AM (UTC+0900)
Submission ID: 2932503599
File name: Merlince_Jola_Marawali_2022210075.docx (3.05M)
Word count: 1136
Character count: 8321

STRATEGI PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM EVALUASI PEMBANGUNAN DESA LANDUNGSARI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



OLEH

MERLINCE JOLA MARAWALI

2022210075

KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

MALANG

2026

RNGKASAN

Dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, penelitian ini menyelidiki strategi Pemerintah Desa Landungsari untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses peninjauan pembangunan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah desa untuk mempromosikan keterlibatan masyarakat, dan temuan menunjukkan bahwa rapat desa terbuka secara rutin digunakan sebagai bentuk komunikasi utama antara pemerintah dan masyarakat. Lebih lanjut, informasi terbuka melalui media sosial dan papan informasi desa membantu menumbuhkan kepercayaan publik. Pemerintah desa juga memasukkan berbagai elemen masyarakat ke dalam forum evaluasi, seperti RT, pemuda, dan PKK, dan membentuk tim pemantauan masyarakat untuk secara langsung menilai hasil pembangunan setelah proyek selesai, yang kemudian dibahas kembali pada rapat dusun. Untuk mengatasi hambatan, teknik yang digunakan menekankan keterlibatan masyarakat yang aktif, memberikan kesadaran tentang nilai partisipasi, dan mendorong partisipasi sukarela dalam bentuk tenaga kerja, peralatan, dan sumbangan lainnya.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Evaluasi Pembangunan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan tingkat pemerintahan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari warganya. Desa diawasi oleh pemerintah kecamatan, yang memiliki struktur manajemen yang memprioritaskan gagasan desentralisasi, memungkinkan masyarakat untuk mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan setempat. Dalam perspektif ini, desa lebih dari sekadar wilayah administratif; desa juga merupakan badan masyarakat yang berbadan hukum dengan batas-batas yang jelas dan kapasitas untuk menangani kepentingan pemerintah dan kebutuhan penduduk setempat. Ini termasuk mengakui nilai-nilai sosial, asal-usul, dan tradisi intrinsik masyarakat, yang sering kali menjadi dasar pengambilan keputusan di tingkat desa.

Kepala desa merupakan figur penting dalam administrasi pemerintahan desa, terutama dalam mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat. Pada kenyataannya, kepala desa tidak bekerja sendirian, melainkan memberikan kepemimpinan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Konsultatif Desa. Tugas ini mencakup berbagai macam pekerjaan, mulai dari mengusulkan rancangan peraturan desa hingga merumuskan pedoman yang disepakati bersama, serta mengelola anggaran desa sebagai landasan pelaksanaan pembangunan. Lebih lanjut, kepala desa bertanggung jawab untuk mendorong inisiatif masyarakat, mengawasi penerapan kebijakan yang telah ditetapkan, dan

memastikan bahwa proses pembangunan desa sejalan dengan kebutuhan dan tujuan bersama masyarakat setempat.

Pembangunan desa merupakan bagian dari proses pembangunan yang lebih besar di bawah administrasi pemerintah daerah yang berupaya mendorong perubahan dalam berbagai elemen kehidupan desa, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial, kelembagaan, dan melalui inisiatif pengurangan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Siagian (2018) mendefinisikan pembangunan sebagai proses perubahan yang disengaja yang dimaksudkan oleh negara untuk mencapai kemajuan dalam kerangka pembangunan bangsa, dengan pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari segi implementasi, pembangunan umumnya dibagi menjadi dua jenis: pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik lebih terlihat, seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum, sedangkan pembangunan non-fisik berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang, seperti peningkatan kesehatan dan penguatan ekonomi desa.

Menurut Theresia dkk. (2015:196), keterlibatan masyarakat mengacu pada keterlibatan orang-orang dalam proses pembangunan di berbagai tingkatan, seperti pembuatan dan perencanaan program, pelaksanaan pembangunan, pembentukan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Komitmen semacam ini tidak terbatas pada kehadiran fisik, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kontribusi finansial, tenaga kerja, seperti kegiatan kerja sama timbal balik, atau ide dan konsep yang membantu proses pertumbuhan. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat diukur tidak hanya dari semangat atau antusiasme yang ditunjukkan, tetapi juga dari sejauh

mana pemerintah benar-benar mengakomodasi kepentingan mereka dan bagaimana proses keterlibatan tersebut dilaksanakan di lapangan. Dalam beberapa kasus, keterlibatan masyarakat di desa-desa masih berada di bawah tingkat ideal, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepentingan pribadi atau kurangnya keterlibatan yang setara dalam proses pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan di Desa Landungsari, teridentifikasi sebuah masalah berupa rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses peninjauan pembangunan, yang masih menjadi kendala hingga saat ini. Kondisi ini sebagian dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat yang kurang baik dan kurangnya sumber daya manusia untuk membantu pelaksanaan pembangunan desa. Masalah ini terlihat jelas pada runtuhnya Jembatan Tirto Taruno pada awal tahun 2024, seperti yang dilaporkan oleh East Java News (detik.com). Jembatan yang berfungsi sebagai penghubung utama antara Dusun Klandungan dan Dusun Bendungan tersebut mengalami kerusakan serius, menghambat pergerakan masyarakat, khususnya kendaraan roda empat, yang tidak dapat melintas dalam waktu lama. Kejadian ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga mengungkap kelemahan dalam pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Kerusakan jembatan menunjukkan bahwa proses pembangunan desa belum mendapatkan dukungan masyarakat yang cukup, terutama selama fase peninjauan. Gejala awal kerusakan infrastruktur mungkin dapat ditemukan lebih cepat jika masyarakat secara aktif terlibat dalam pengawasan sosial, seperti melaporkan kondisi lahan kepada pihak yang berwenang. Namun, karena keterlibatan ini

terbatas, indikator kerusakan kecil jarang ditangani cukup dini dan akhirnya berkembang menjadi kerusakan yang lebih signifikan.

Kondisi ini menyebabkan biaya perbaikan yang lebih tinggi dan inefisiensi karena perbaikan komprehensif diperlukan akibat kurangnya tindakan pencegahan. Kasus ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam peninjauan pembangunan sangat penting untuk mempertahankan kualitas hasil pembangunan. Ketika keterlibatan tersebut tidak dimaksimalkan, bahaya kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan meningkat, termasuk kualitas pekerjaan, transparansi anggaran, dan keberlanjutan program.

Pemerintah desa harus melakukan upaya yang disengaja untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses peninjauan pembangunan. Jika diimplementasikan dengan benar, keterlibatan masyarakat dapat meningkat dan pada akhirnya berkontribusi pada proses pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus mengurangi terjadinya masalah serupa di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemerintah desa berencana meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses peninjauan pembangunan desa?
2. Apa saja hambatan dan faktor pendukung dalam melaksanakan pendekatan pemerintah desa untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam evaluasi pembangunan desa?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk lebih memahami inisiatif pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam evaluasi pembangunan desa.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pemerintah desa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penilaian pembangunan desa.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi intelektual untuk kemajuan ilmu administrasi publik, khususnya di bidang-bidang seperti pemerintahan desa, keterlibatan masyarakat, dan penilaian pembangunan.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Pemerintah Desa Landungsari

Menjadi masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan langkah-langkah yang lebih berhasil untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya pada tahap penilaian pembangunan desa.

b. Bagi Masyarakat Desa Landungsari

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses penilaian pembangunan, baik sebagai bentuk pengawasan, metode penyampaian tujuan, maupun sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam memastikan keberlanjutan pembangunan desa.

c. Bagi Universitas

Meningkatkan kualitas literatur ilmiah di lingkungan universitas, khususnya di Program Studi Administrasi Publik, serta berfungsi sebagai referensi bagi mahasiswa ketika menyusun karya ilmiah di masa mendatang.

d. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan, menambah keahlian, dan meningkatkan kemampuan akademisi dalam menerapkan teori Administrasi Publik pada operasional pemerintahan desa, khususnya cara-cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penilaian pembangunan.

Merlince Jola Marawali_2022210075

ORIGINALITY REPORT

16%	13%	9%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	11
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	



rinjani.unitri.ac.id	as Putera Batam Student Paper	%
Internet Source	repository.umsu.ac.id Internet Source	1 %
	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	1 %
jurnal.untag-sby.ac.id	repository.ummat.ac.id Internet Source	1 %
Internet Source	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	1 %
	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
	Submitted to St. Ursula Academy High School Student Paper	1 %
Submitted to Universit	itdc.co.id Internet Source	1 %
	repository.unibos.ac.id Internet Source	1 %

UNIVERSITAS BRAWIJAYA TUNGGUL DEWI MALANG

12	Shania Fonika Intan Umboh, Elsje Pauline Manginsela, Vicky Richard Bernhard Moniaga. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN PERKEBUNAN DI DESA KANEYAN KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2020 Publication	1 %
13	Susanto, Muhammad Iqbal, Subarto. "Fraud Prevention Efforts In Managing Village Funds In Accordance With Aspects of Human Resource Management with Transparency Principles", International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship, 2022 Publication	1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		